



## **Challenges and Strategies in Achieving Financial Transparency at Tadika Al Fikh Orchard Pendamar Indah, Selangor Malaysia**

**Alya Annisa Salwa Ritonga**

[alyaannisa2504@gmail.com](mailto:alyaannisa2504@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Alfi Amalia**

[alfiamalia@umsu.ac.id](mailto:alfiamalia@umsu.ac.id)

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of financial management transparency at Tadika Al-Fikh Orchard Pandamar Indah and to examine the role of Islamic values in financial practices within an early childhood Islamic educational institution. The research employs a qualitative approach with a descriptive-interpretative design to gain an in-depth understanding of the dynamics of financial governance in an Islamic institutional context. The research participants included the principal, treasurer, teachers, and representatives of parents. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis. Data analysis was conducted through the stages of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The validity of the findings was ensured through source and method triangulation techniques. The findings indicate that efforts toward financial transparency have been undertaken through the periodic disclosure of fund utilization to parents. However, the implementation has not yet been standardized within a systematically documented reporting system. The main challenges include limited technical competence of financial administrators, reliance on manual bookkeeping systems, and minimal use of digital technology in financial administration. Furthermore, Islamic values such as amanah (trustworthiness), tabligh (transparency in conveying information), and fathanah (professional competence) are understood as moral foundations in financial management, yet they have not been fully integrated into operational procedures and accountable, measurable reporting mechanisms. This study highlights that strengthening financial transparency and accountability in Islamic educational institutions requires integrating human resource development, digital financial systems, and the internalization of Islamic values to achieve professional, sustainable, and integrity-driven governance practices..

**Keywords:** Financial Transparency, Islamic Education, Accountability

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan transparansi pengelolaan keuangan di Tadika Al-Fikh Orchard Pandamar Indah serta mengkaji peran nilai-nilai Islam dalam praktik pengelolaan dana pada lembaga pendidikan anak usia dini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif untuk memahami secara mendalam dinamika tata kelola keuangan dalam konteks kelembagaan Islam. Subjek penelitian meliputi kepala tadika, bendahara, guru, dan perwakilan orang tua. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilaksanakan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan temuan dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya transparansi keuangan telah dilakukan melalui penyampaian informasi penggunaan dana kepada orang tua secara berkala. Namun demikian, implementasinya belum terstandarisasi dalam sistem pelaporan yang terdokumentasi secara sistematis. Kendala utama meliputi keterbatasan kompetensi teknis pengelola, penggunaan sistem pencatatan manual, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi keuangan. Selain itu, nilai-nilai Islam seperti amanah, tabligh, dan fathanah telah dipahami sebagai fondasi moral dalam pengelolaan dana, tetapi belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam prosedur operasional dan mekanisme pelaporan yang akuntabel dan terukur. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan di lembaga pendidikan Islam memerlukan integrasi antara penguatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem keuangan, serta internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik manajerial, guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berkelanjutan, dan berbasis integritas.

**Kata kunci:** *Transparansi Keuangan, Pendidikan Islam, Akuntabilitas.*

## **Pendahuluan**

Pendidikan anak usia dini menempatkan lembaga pendidikan pada posisi yang sangat strategis dalam membentuk fondasi karakter, nilai moral, dan integritas peserta didik sejak fase perkembangan awal. Pada tahap ini, proses internalisasi nilai berlangsung secara intensif dan menentukan arah pembentukan kepribadian di masa mendatang. Fungsi strategis tersebut tidak hanya direpresentasikan melalui kurikulum dan aktivitas pembelajaran, tetapi juga tercermin dalam praktik tata kelola kelembagaan yang mencerminkan nilai kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan amanah. Artinya, integritas institusi tidak semata diukur dari capaian akademik atau religius peserta didik, tetapi juga dari konsistensi lembaga dalam menerapkan prinsip-prinsip etis

dalam pengelolaan sumber daya, termasuk dalam aspek keuangan. Oleh karena itu, transparansi keuangan menjadi elemen krusial yang menentukan kualitas governance lembaga sekaligus menjadi indikator utama tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam, seperti Tadika Al-Fikh Orchard Pandamar Indah (Kholiq & Wahyunik, 2025).

Transparansi keuangan dalam lembaga pendidikan menuntut adanya keterbukaan informasi yang sistematis dan terstruktur mengenai seluruh siklus pengelolaan dana, mulai dari perencanaan anggaran, penerimaan dana, realisasi penggunaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Keterbukaan tersebut harus dapat diakses secara jelas, akurat, dan tepat waktu oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme preventif terhadap potensi penyalahgunaan dana serta sebagai instrumen penguatan akuntabilitas publik (Adzkie et al., 2024). Berdasarkan kerangka *school-based financial management* yang diterapkan di Malaysia, otonomi lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya keuangan harus diimbangi dengan sistem pengawasan, pelaporan, dan audit yang memadai agar prinsip akuntabilitas tetap terjaga secara institusional (Radzi et al., 2017). Tanpa keseimbangan tersebut, otonomi berpotensi melahirkan kerentanan terhadap praktik manajerial yang tidak terkontrol.

Namun demikian, efektivitas transparansi keuangan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan struktural semata. Dimensi budaya, nilai sosial, serta pola relasi kekuasaan dalam komunitas turut memengaruhi bagaimana transparansi dipahami dan dipraktikkan. Pada masyarakat Melayu-Islam, budaya segan, penghormatan terhadap otoritas, serta kecenderungan untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola tanpa mekanisme verifikasi yang memadai sering kali menghambat terbentuknya sistem kontrol yang kritis dan partisipatif. Pola relasi yang hierarkis dapat mengurangi keberanian pemangku kepentingan untuk meminta klarifikasi atau melakukan

evaluasi terhadap pengelolaan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya persoalan regulasi, tetapi juga persoalan budaya organisasi dan kesadaran kolektif.

Transparansi keuangan dalam perspektif normatif Islam memiliki dimensi teologis yang kuat karena berkaitan langsung dengan konsep amanah. Pengelolaan harta, termasuk dana pendidikan, dipandang sebagai titipan yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Prinsip penyampaian amanah dan larangan terhadap praktik kecurangan dalam pengelolaan harta ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sehingga transparansi tidak dapat direduksi menjadi kewajiban administratif belaka. Ia merupakan tanggung jawab moral-spiritual yang bernilai ibadah dan memiliki implikasi eskatologis. Dengan demikian, kegagalan dalam membangun transparansi bukan hanya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, tetapi juga mencerminkan inkonsistensi antara nilai yang diajarkan dan praktik kelembagaan yang dijalankan.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, upaya mewujudkan transparansi keuangan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan komprehensif yang melampaui pembenahan administratif semata. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen keuangan, penerapan sistem pelaporan berbasis digital yang terdokumentasi dan terstandar, optimalisasi mekanisme pengawasan internal, serta pelibatan aktif orang tua dan komite sekolah menjadi prasyarat penting dalam membangun sistem yang akuntabel. Strategi-strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan apabila didukung oleh komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan (Radzi et al., 2017).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan transparansi keuangan di Tadika Al-Fikh Orchard Pandamar Indah tidak dapat dipisahkan dari integrasi antara profesionalisme manajerial dan internalisasi nilai-nilai syariah. Transparansi harus dipahami sebagai sistem yang

menyatukan dimensi teknis, struktural, kultural, dan spiritual secara simultan. Tata kelola keuangan dalam lembaga pendidikan Islam bukan sekadar persoalan efisiensi administratif, melainkan juga refleksi integritas moral dan konsistensi nilai yang menjadi fondasi eksistensi lembaga itu sendiri.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik transparansi pengelolaan keuangan di Tadika Al-Fikh Orchard Pandamar Indah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak bertujuan mengukur fenomena secara statistik, melainkan menelaah proses, makna, dan dinamika sosial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana pendidikan. Jenis sumber data dari penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh secara bersamaan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, serta kajian dokumentasi. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait sistem, mekanisme, dan nilai-nilai yang melandasi praktik transparansi keuangan di lembaga pendidikan Islam anak usia dini.

Sumber data primer diperoleh dari informan yang memiliki keterlibatan langsung dan relevan dengan pengelolaan serta pengawasan keuangan, meliputi kepala tadika, bendahara atau penanggung jawab keuangan, guru-guru, perwakilan orang tua/wali murid, serta komite atau pengawas internal sekolah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan pengalaman, peran, dan tanggung jawab informan dalam proses pengelolaan keuangan lembaga. Teknik snowball sampling digunakan secara terbatas untuk menjaring informan tambahan apabila diperlukan, dengan jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data yang didapat mengidentifikasi pola yang berulang sehingga data tidak memberikan temuan baru yang bersifat substantif.

Selain data primer, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan, buku kas, bukti transaksi, SOP pengelolaan keuangan, notulen rapat, dan dokumen administratif lainnya sebagai bahan verifikasi. Analisis data dihimpun secara kualitatif dengan tahapan reduksi dan pemadatan data, penyediaan informasi, serta proses perumusan dan pengujian kesimpulan. Guna memastikan validitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan teknik, member check, serta dukungan bukti dokumenter yang memadai. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mencerminkan kondisi empiris yang valid, kredibel, dan kontekstual terkait transparansi pengelolaan keuangan di Tadika Al-Fikh Orchard Pandamar Indah.

## **Pembahasan Dan Diskusi**

### **Konsep Transparansi Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan**

Transparansi keuangan dalam lembaga pendidikan merupakan prinsip tata kelola yang menekankan keterbukaan informasi secara komprehensif dan terukur, meliputi identifikasi sumber pendanaan, proses perencanaan dan penganggaran, mekanisme pelaksanaan dan realisasi belanja, hingga sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan informasi, tetapi sebagai proses komunikasi institusional yang memungkinkan terjadinya kontrol sosial dan evaluasi publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Penelitian Samosir (2024) dan Mulgan (2000) menegaskan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama dalam membangun akuntabilitas publik (*public accountability*) serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan sosial terhadap lembaga pendidikan. Dalam kerangka teori good governance, transparansi berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap potensi penyimpangan serta sebagai mekanisme korektif melalui partisipasi masyarakat.

Urgensi transparansi menjadi semakin signifikan karena karakteristik pendanaannya yang bertumpu pada kontribusi orang tua dan dukungan

komunitas. Ketergantungan pada sumber dana partisipatif tersebut menempatkan lembaga pada posisi moral dan administratif untuk memastikan bahwa setiap alokasi dan penggunaan dana dapat diakses, dipahami, serta dipertanggungjawabkan secara rasional. Transparansi, dalam hal ini, tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga representasi etika pengelolaan amanah (*fiduciary responsibility*) yang melekat pada lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, dimensi normatif dan teknokratis transparansi berjalan secara simultan.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa Tadika Al-Fikh Orchard Pandamar Indah telah mengupayakan implementasi prinsip transparansi melalui penyampaian informasi keuangan secara berkala kepada orang tua, khususnya terkait penggunaan dana operasional dan pembiayaan kegiatan pembelajaran. Praktik ini mencerminkan adanya kesadaran institusional mengenai pentingnya keterbukaan informasi. Namun demikian, mekanisme yang digunakan masih bersifat sederhana, komunikatif, dan belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem pelaporan yang terstruktur, terdigitalisasi, maupun terstandarisasi. Transparansi lebih dipraktikkan sebagai bentuk komunikasi interpersonal dan forum informal ketimbang sebagai sistem tata kelola keuangan yang berbasis prosedur baku dan indikator kinerja yang terukur.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif mengenai transparansi dan implementasi teknisnya dalam tata kelola lembaga. Transparansi yang bersifat informal berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam interpretasi data, keterbatasan jejak audit (*audit trail*), serta lemahnya konsistensi dokumentasi. Fenomena ini sejalan dengan temuan Ahmad et al. (2019) dan Yasin & Mokhtar (2022) yang menyatakan bahwa banyak lembaga pendidikan di Malaysia menghadapi disparitas antara konsep transparansi yang ideal yang menuntut sistem pelaporan akuntabel dan terstandar dengan praktik aktual yang cenderung administratif minimalis. Ketiadaan standar pelaporan yang seragam, keterbatasan kapasitas manajerial,

serta rendahnya literasi keuangan pengelola sering kali menyebabkan transparansi bersifat simbolik atau procedural compliance semata, bukan sebagai mekanisme kontrol yang substantif.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa transparansi keuangan tidak dapat direduksi menjadi sekadar keterbukaan informasi, melainkan harus dipahami sebagai konstruksi sistemik yang mencakup desain kebijakan, prosedur operasional, instrumen dokumentasi, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan. Transparansi yang efektif mensyaratkan adanya standar operasional prosedur (SOP), format pelaporan yang terstruktur, pemisahan fungsi perencanaan dan pengawasan, serta aksesibilitas informasi yang inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanpa perangkat tersebut, keterbukaan cenderung kehilangan daya kontrolnya dan berpotensi menjadi formalitas administratif yang tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola.

Dengan demikian, transparansi keuangan dalam lembaga pendidikan Islam anak usia dini perlu diposisikan sebagai proses institusional yang integratif, yang menggabungkan dimensi keterbukaan informasi, akuntabilitas administratif, partisipasi stakeholder, serta penguatan kapasitas manajerial. Temuan di Tadika Al-Fikh Orchard Pandamar Indah menegaskan bahwa tanpa sistem pendukung yang memadai baik dalam bentuk regulasi internal, standar pelaporan, maupun dokumentasi yang konsisten transparansi berisiko tereduksi menjadi praktik komunikasi simbolik. Oleh karena itu, penguatan konsep dan implementasi transparansi harus diarahkan pada pembentukan mekanisme pelaporan yang terstruktur, terdokumentasi secara sistematis, berkesinambungan, serta mudah diakses dan dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga transparansi benar-benar berfungsi sebagai fondasi akuntabilitas dan peningkatan mutu kelembagaan.

### **Nilai-Nilai Dalam Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan dalam lembaga pendidikan Islam secara normatif berakar pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan dimensi moral, spiritual, dan profesional secara simultan. Nilai amanah mengandung

konsekuensi etis bahwa setiap dana yang diterima dan dikelola merupakan titipan yang harus dijaga integritasnya serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan jujur. Prinsip *tabligh* menuntut adanya keterbukaan informasi yang komunikatif dan dapat diverifikasi, sehingga tidak terjadi asimetri informasi antara pengelola dan pemangku kepentingan. Sementara itu, *fathanah* mensyaratkan kecakapan intelektual, kompetensi teknis, dan profesionalisme dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan. Ketiga nilai tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk kerangka etik-manajerial yang saling melengkapi dalam membangun tata kelola keuangan yang berintegritas. Landasan normatif ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui perintah menunaikan amanah dan larangan terhadap segala bentuk kecurangan dalam pengelolaan harta, sehingga pengelolaan keuangan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai manifestasi tanggung jawab keagamaan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengelola Tadika Al-Fikh memaknai pengelolaan keuangan sebagai bagian integral dari tanggung jawab moral dan religius. Kepala tadika dan bendahara menyadari bahwa dana yang bersumber dari orang tua dan masyarakat merupakan amanah kolektif yang menuntut kejujuran, kehati-hatian, dan komitmen pertanggungjawaban. Kesadaran normatif ini mencerminkan adanya internalisasi nilai spiritual dalam persepsi pengelola. Namun demikian, pemahaman tersebut belum sepenuhnya terkonversi ke dalam praktik teknis yang sistematis, seperti pencatatan keuangan berbasis standar akuntansi sederhana, dokumentasi transaksi yang terdigitalisasi, maupun pelaporan berkala yang terdokumentasi secara formal. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara kesadaran etik dan kapasitas operasional dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara optimal.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Hassan et al. (2021) yang menyatakan bahwa internalisasi nilai Islam dalam pengelolaan keuangan pada banyak lembaga pendidikan sering kali berhenti pada tataran normatif dan

simbolik, tanpa diikuti transformasi ke dalam sistem manajerial yang profesional dan terstandar. Nilai amanah dipahami sebagai komitmen moral personal, tetapi belum sepenuhnya diinstitusionalisasikan dalam bentuk prosedur, regulasi internal, dan mekanisme kontrol yang terukur. Penelitian Rahimah (2021) juga menunjukkan bahwa kelemahan aspek teknis, seperti penggunaan pencatatan manual dan ketiadaan sistem dokumentasi yang konsisten, berpotensi menghambat realisasi nilai amanah dan kejujuran secara substantif. Keterbatasan tersebut bukan hanya persoalan administratif, melainkan berimplikasi pada terbatasnya kemampuan lembaga dalam membangun akuntabilitas yang dapat diaudit dan diverifikasi secara objektif.

**Tabel 1: Tabel Analisis Pengelolaan Keuangan Berbasis Nilai Islam**

| <b>Aspek</b>            | <b>Uraian Normatif</b>  | <b>Realitas/Temuan Lapangan</b>   | <b>Analisis &amp; Implikasi</b>  |
|-------------------------|---|---|--|
| <b>Amanah</b>           | Dana merupakan titipan yang harus dikelola secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tanggung jawab moral dan religius. | Pengelola menyadari dana sebagai amanah kolektif dari orang tua dan masyarakat.                   | Kesadaran etik sudah kuat, tetapi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam prosedur dan sistem kontrol yang terukur. |
| <b>Tabligh</b>          | Keterbukaan informasi yang komunikatif dan dapat diverifikasi untuk mencegah asimetri informasi.  | Belum terdapat pelaporan berkala yang terdokumentasi formal dan sistem informasi yang transparan. | Transparansi masih bersifat personal, belum berbasis sistem dokumentasi yang terdigitalisasi dan terstandar.             |
| <b>Fathanah</b>         | Kecakapan intelektual dan profesional dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.   | Pencatatan masih manual, belum berbasis standar akuntansi sederhana atau sistem digital.          | Terdapat kesenjangan antara nilai profesionalisme dan kapasitas teknis operasional.                                      |
| <b>Landasan Qur'ani</b> | Perintah menunaikan amanah dan larangan kecurangan dalam pengelolaan harta.   | Nilai religius diinternalisasi sebagai motivasi moral.  | Nilai spiritual perlu diterjemahkan ke dalam SOP, regulasi internal, dan mekanisme audit agar terukur secara objektif.   |
| <b>Kesenjangan</b>      | Idealitas syariah   | Praktik belum   | Diperlukan   |

|                              |   |   |  |
|------------------------------|---|---|--|
| <b>Normatif-Praktis</b>      | menuntut integrasi moral dan profesional.                             | sepenuhnya sistematis dan terdokumentasi.                                 | standarisasi prosedur, pemisahan fungsi pengawasan, serta sistem pelaporan yang akuntabel.   |
| <b>Rekomendasi Strategis</b> | Integrasi nilai spiritual dan profesional dalam tata kelola keuangan. | Literasi keuangan syariah dan kompetensi teknis masih perlu ditingkatkan. | Pelatihan, digitalisasi pencatatan, dan standarisasi prosedur menjadi sarana konkret merealisasikan nilai amanah, transparansi, dan keberlanjutan. |

Secara analitis, fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas nilai syariah dan realitas praktik pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan. Nilai-nilai Islam memiliki potensi normatif yang kuat sebagai fondasi tata kelola, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas institusional untuk menerjemahkannya ke dalam sistem kerja yang terstruktur. Tanpa dukungan prosedur operasional standar, pemisahan fungsi pengawasan, serta mekanisme pelaporan yang jelas, nilai amanah berisiko tereduksi menjadi komitmen personal yang sulit diukur keberhasilannya. Dengan demikian, penguatan aspek teknis bukanlah bentuk sekularisasi tata kelola, melainkan justru sarana konkret untuk merealisasikan nilai-nilai spiritual secara lebih akuntabel.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan berbasis nilai Islam perlu diiringi dengan peningkatan literasi keuangan syariah serta penguatan kompetensi teknis pengelola melalui pelatihan, standarisasi prosedur, dan pemanfaatan teknologi digital. Integrasi antara dimensi spiritual dan profesional menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem keuangan yang tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga mencerminkan integritas moral. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam akan berfungsi secara efektif dalam mendukung transparansi apabila diwujudkan dalam prosedur operasional yang jelas, terdokumentasi, akuntabel,

dan terukur. Dengan demikian, harmonisasi antara kesadaran religius dan profesionalisme manajerial merupakan kunci strategis dalam membangun sistem keuangan yang amanah, transparan, dan berkelanjutan di lembaga pendidikan Islam.

### **Strategi Peningkatan Transparansi Keuangan**

Strategi peningkatan transparansi keuangan dalam lembaga pendidikan menuntut pendekatan yang komprehensif, integratif, dan berorientasi jangka panjang. Transparansi bukanlah hasil dari satu kebijakan tunggal, melainkan produk dari interaksi antara sistem manajerial, kapasitas sumber daya manusia, regulasi internal, serta budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas. Penelitian Radzi et al. (2017) dan Freeman (1984) menekankan bahwa keterlibatan aktif pemangku kepentingan (stakeholder engagement), peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi secara efektif merupakan elemen fundamental dalam membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam perspektif teori stakeholder, legitimasi lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam merespons ekspektasi dan hak informasi para pihak yang terdampak oleh kebijakan keuangan. Dengan demikian, transparansi harus dipahami sebagai proses kolaboratif yang melibatkan kebijakan, sistem operasional, dan budaya organisasi secara simultan.

Hasil temuan lapangan di Tadika Al-Fikh menunjukkan bahwa strategi transparansi yang berjalan saat ini masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis. Keterbatasan kompetensi bendahara dalam bidang akuntansi dasar, penggunaan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan administrasi, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan internal menjadi faktor yang membatasi efektivitas transparansi. Sistem manual tidak hanya memperlambat proses pelaporan, tetapi juga menyulitkan proses verifikasi dan audit, sehingga mengurangi tingkat keandalan informasi keuangan. Di sisi lain, kendala tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan

transparansi tidak sepenuhnya bersumber pada kurangnya komitmen moral, melainkan lebih pada keterbatasan kapasitas institusional.

Meskipun demikian, terdapat potensi strategis yang dapat dikembangkan, terutama melalui peningkatan partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam proses evaluasi laporan keuangan. Keterlibatan ini, meskipun belum diformalkan dalam mekanisme baku seperti forum audit partisipatif atau rapat evaluasi berkala yang terdokumentasi, menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya kontrol sosial terhadap pengelolaan dana. Potensi ini dapat menjadi fondasi bagi pembentukan mekanisme partisipatif yang lebih sistematis dan terstruktur, sehingga transparansi tidak lagi bersifat informatif satu arah, melainkan dialogis dan akuntabel.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ismail dan Abdullah (2018) serta Nurmala (2020) yang menegaskan bahwa pengawasan internal dan audit berkala merupakan instrumen krusial dalam menjaga konsistensi transparansi keuangan sekolah. Tanpa sistem pengawasan yang jelas, keterbukaan informasi cenderung kehilangan daya kontrolnya dan berisiko menjadi formalitas administratif. Lebih lanjut, OECD (2018) merekomendasikan digitalisasi sistem pengelolaan keuangan sebagai strategi efektif untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan ketepatan waktu pelaporan. Digitalisasi tidak hanya mempermudah pencatatan transaksi, tetapi juga menciptakan jejak audit (*audit trail*) yang dapat ditelusuri secara sistematis. Dalam konteks Tadika Al-Fikh, penerapan sistem digital sederhana—misalnya melalui perangkat lunak akuntansi dasar atau aplikasi pencatatan berbasis cloud—berpotensi menjadi solusi realistis untuk mengatasi keterbatasan teknis tanpa membebani kapasitas lembaga secara berlebihan.

Strategi peningkatan transparansi harus dirancang dalam kerangka penguatan tiga pilar utama: kapasitas sumber daya manusia, sistem teknologi yang mendukung, dan partisipasi stakeholder yang terinstitusionalisasi. Penguatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan literasi keuangan, standarisasi prosedur operasional, dan pembagian tugas yang jelas antara

fungsi pencatatan, verifikasi, dan pengawasan. Digitalisasi sistem pencatatan berfungsi sebagai instrumen efisiensi sekaligus mekanisme kontrol. Sementara itu, penguatan peran stakeholder khususnya orang tua dan komite sekolah perlu diarahkan pada pembentukan forum evaluasi rutin dan mekanisme umpan balik yang terdokumentasi.

Strategi tersebut dalam dunia lembaga pendidikan Islam anak usia dini harus diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab kolektif (*mas'uliyah jama'iyah*). Integrasi ini penting agar reformasi teknis tidak terlepas dari landasan moral yang menjadi identitas institusi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang menggabungkan dimensi teknis dan nilai religius tidak hanya meningkatkan akuntabilitas administratif, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan kepercayaan orang tua serta masyarakat terhadap lembaga. Dengan demikian, transparansi keuangan tidak dapat diposisikan semata sebagai tujuan administratif, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang menopang keberlanjutan, integritas, dan kredibilitas lembaga pendidikan Islam dalam jangka panjang.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan di Tadika Al-Fikh Orchard Pandamar Indah telah diupayakan melalui penyampaian informasi penggunaan dana kepada orang tua, namun pelaksanaannya masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dalam sistem pelaporan yang terstandarisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam teori dan temuan penelitian terdahulu. Keterbatasan kompetensi teknis pengelola serta belum optimalnya sistem pencatatan menjadi faktor utama yang mempengaruhi belum maksimalnya praktik transparansi tersebut.

Dari perspektif pendidikan Islam, pengelolaan keuangan di Tadika Al-Fikh secara normatif telah berlandaskan nilai-nilai syariah seperti amanah, tabligh, dan fathanah, yang dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah. Namun, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara pemahaman nilai-nilai tersebut dan implementasinya dalam praktik teknis pengelolaan keuangan. Nilai-nilai Islam belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam prosedur pencatatan dan pelaporan yang sistematis, sehingga potensi transparansi berbasis nilai religius belum terwujud secara optimal.

Dengan demikian, upaya penguatan transparansi keuangan pada lembaga pendidikan Islam khususnya pada anak usia dini memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem keuangan, serta peningkatan peran dan partisipasi pemangku kepentingan, khususnya orang tua dan komite sekolah. Integrasi antara pendekatan teknis dan internalisasi nilai-nilai Islam menjadi kunci dalam membangun sistem keuangan yang akuntabel secara administratif, dan memiliki legitimasi moral sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.

## References

- Ahmad, N., Salleh, M., & Idris, F. (2019). Financial reporting practices in Malaysian schools: Issues and challenges. *Journal of Education and Practice*, 10(4), 112–120.
- Amini, S. (2025). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Dana BOS*. Universitas Negeri.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing.
- Hassan, M., Yusoff, W., & Karim, R. (2021). Islamic financial literacy and transparency in early childhood education institutions. *Islamic Economic Studies*, 28(3), 45–60.
- Ismail, Z., & Abdullah, N. (2018). Challenges of financial transparency in Malaysian private schools. *Malaysian Journal of Educational Management*, 6(2), 77–91.
- Kemdikbud. (2023). *Transparansi Keuangan Lembaga Pendidikan (Jendela Pendidikan)*.
- Kompasiana. (2022). *Hubungan Transparansi Keuangan dan Mutu Pembelajaran*. <https://www.kompasiana.com>
- Lee, T., & Wong, K. (2020). Education governance and transparency issues in developing countries. *Asia Pacific Journal of Education*, 40(1), 23–40.
- Mardiani, D. (2024). Determinants of financial management effectiveness in elementary schools. *Journal of Educational Finance*, 49(2), 201–219.
- Nurmala. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 51–63.
- OECD. (2018). *Education Governance Review: Transparency, Accountability, and School Autonomy*. OECD Publishing.

- Puwari, I. (2020). *Manajemen Dana BOS dan Penguatan Mutu Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Radzi, N. M., Ghani, M., & Siraj, S. (2017). Financial decentralization and accountability in Malaysian schools.
- Rahimah. (2021). Manajemen keuangan sekolah dan pengaruhnya terhadap efektivitas lembaga pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 6(2), 101–110.
- Samosir, H. (2024). *Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi Penggunaan Dana Bos terhadap Kinerja Kepala Sekolah di SMA Si Empat Nempu Hilir Kabupaten Dairi*.
- Yasin, N., & Mokhtar, A. (2022). Challenges to Financial Transparency in Malaysian Schools. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 11(3), 151–163.